

EDISI : Selasa, 14 Mei 2019,

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG



Nama Media : **NUSA BALI**

Kategori : **PENGLOLOAN LAHAN**

# 'Tanah Telantar' di Pancasari Seluas 67,35 Hektare

★ Pihak Desa Berniat Ajukan Pemanfaatan

Lahan yang dulunya berstatus HGB akan dimanfaatkan sebagai wisata alam pendukung objek wisata Danau Buyan.

lahan tersebut. Konon, 20 KK itu sudah menempati lahan tersebut cukup lama. Lahan yang ditempati dikelola dengan tanaman bunga dan buah seperti pisang, jagung dan lainnya.

Perbekel Pancasari, I Wayan Darsana, mengakui ada warganya sebanyak 20 KK tinggal di atas lahan yang ditelantarkan tersebut. Namun, ia tidak tahu persis kapan 20 KK warganya tinggal di atas lahan HGB tersebut. "Persisnya tidak tahu, tetapi kayaknya sudah lama, sebelum HGB terbit mereka sudah tinggal dan mengelola lahan yang ditempati," terang Darsana, Minggu (12/5).

Menurutnya, pihaknya tertarik mengelola selain karena lahannya tidak dimanfaatkan, juga sudah ada warganya yang tinggal di atas lahan tersebut. Namun, pertimbangan utama pengelolaan itu guna mendukung objek wisata Danau Buyan. Rencananya lahan yang ada itu akan dijadikan wahana wisata alam. "Ini baru pemikiran kami bersama para tokoh masyarakat dan tokoh pariwisata bagaimana desa bisa memiliki pendapatan asli sendiri. Dan kami sudah pernah sampaikan kepada Pak Bupati



I Wayan Darsana

secara lisan. Mungkin nanti kami harus tindaklanjuti dengan surat permohonan secara resmi," aku Darsana.

Lahan telantar seluas 67,35 hektare di Desa Pancasari terungkap ketika pihak pemegang sertifikat HGB berniat mengajukan perpanjangan masa penguasaan kepada pihak BPN Buleleng. Namun, BPN Buleleng tidak punya kewenangan karena perpanjangan masa penguasaan itu di atas 5 hektar. BPN Buleleng menyarankan agar perpanjangan itu diurus ke Kanwil BPN Bali di Denpasar. Namun salah satu syarat perpanjangan itu, pihak

pemohon harus melengkapi seluruh izin yang diperlukan dalam pemanfaatan lahan tersebut.

Rencananya, lahan tersebut dimanfaatkan untuk sarana akomodasi dan eko tourism. Nah, izin-izin itu harus diterbitkan oleh Pemkab Buleleng. Kabarnya, Pemkab Buleleng tidak akan keluar izin, karena menilai pihak pemegang HGB sudah wanprestasi, lantaran sejak HGB dikuasai tidak ada aktivitas di atas lahan tersebut. "Ini kan sudah wanprestasi namanya. Saya memang tidak akan memberikan izin untuk perpanjangan HGB itu," tegas Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana saat dikonfirmasi sebelumnya.

Menurut Bupati, pihaknya memandang perlu mempertahankan kawasan di daerah Pancasari karena kawasan itu merupakan daerah konservasi dan daerah resapan air. "Kalau di daerah atas (Pancasari, Red) saya memang agak ketat. Karena di situ merupakan hulu, dan asaya ingin mempertahankan sebagian kawasan konservasi dan daerah resapan air. Di situ ada danau yang memberi kehidupan masyarakat banyak," tandas Bupati Agus Suradnyana. **k19**

• MUSABALI/SUDIRTA

SINGARAJA, NusaBali

Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, mulai membidik lahan telantar seluas 67,35 hektare di wilayahnya. Tanah itu dinilai tak termanfaatkan setelah pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Sari Buana Handara, tidak pernah memanfaatkan lahan tersebut. Sejak HGB keluar sekitar tahun 1990-an silam hingga HGB habis masa berlaku di tahun 2012, lahan tersebut tidak pernah disentuh.

Informasinya, di atas lahan itu sudah ada sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) asal Desa Pancasari yang menempati dan mengelola langsung sebagian kecil dari

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *RANPERDA*

## Perda Bank Buleleng Masih Terganjil Naskah Akademik

SINGARAJA, NusaBali

Pengesahan ranperda tentang perubahan BPR Bank Buleleng 45, menjadi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), akhirnya ditunda. Seluruh fraksi meminta agar ranperda tersebut dilengkapi dengan dokumen naskah akademik.

Tadinya ada tiga ranperda yang akan disahkan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan 16 Mei 2019 mendatang. Tiga ranperda itu yakni ranperda PT BPR Bank Buleleng 45, ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dan ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan. Namun dalam rapat dengan agenda pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRD Buleleng, yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatha Senin (13/5), seluruh fraksi berjumlah 6 Fraksi, kompak menunda pengesahan ranperda PT BPR Bank Buleleng 45, dengan alasan ranperda tersebut belum dilengkapi naskah akademik.

Penundaan itu sesuai dengan hasil kesepakatan Pansus dengan eksekutif, serta hasil

Konsultasi ke Kemendagri. Naskah Akademik diperlukan agar Perda PT BPR Bank Buleleng 45 lebih sempurna dan jangkauan yang lebih luas, baik dari segi permodalan maupun dari segi kegiatan usaha. Perubahan BPR Bank Buleleng menjadi PT, akan mempermudah proses penyertaan modal. Karena dalam regulasinya, memungkinkan pihak ketiga, bisa memiliki saham salah satu Perusahaan Daerah (PD) Pemkab Buleleng tersebut.

Direktur Utama PD BPR Bank Buleleng 45, Nyoman Surajaya menjelaskan, pengajuan perubahan ranperda itu wajib sebagai turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Menurutnya, perubahan badan hukum menjadi Perseroda juga dibutuhkan dalam pengembangan usaha perbankan. Salah satu yang bisa dikembangkan adalah terkait dengan tatacara penyertaan modal. Selama

ini, jika masih berstatus Perusahaan daerah, Penyertaan Modal hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai pemilik saham. Sementara dalam raperda ini, nantinya memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kepemilikan saham. "Ketika kita memerlukan penyertaan modal, Perda ini memungkinkan untuk menjual saham kepada pihak ketiga. Jadi dari sisi regulasinya bisa lebih gampang ketika kita memerlukan penyertaan modal," jelasnya.

Terkait dengan dokumen Naskah Akademik yang diminta seluruh fraksi? Dirut Bank Buleleng Surajaya menegaskan, pihaknya segera melakukan peninjauan pada beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk ditunjuk menjadi pihak ketiga, dalam menyusun dokumen Naskah Akademik tersebut.

"Kami tidak paham, karena sekarang harus melampirkan, ya kami akan buat. Nanti jika sudah kami tunjuk rekanannya, kami target Agustus harus sudah selesai," tegas Suarjaya. **k19**

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *Pendidikan*



SISWA SMA/SMK yang merayakan kelulusan dengan seragam disemprot cat di depan GOR Bhuana Patra Buleleng, Senin (13/5).

## Dua Siswa di Buleleng Tak Lulus UN SMA/SMK

SINGARAJA, NusaBali

Tingkat kelulusan jenjang SMA/SMK di tahun 2019 di Buleleng, tak tercapai seratus persen menyusul kandasnya satu siswa SMKN 3 Singaraja dan satu siswa SMAN 2 Busungbiu

Ketut Satya Wiguna Prata-ma, 17, yang berstatus siswa kelas XII SMKN 3 Singaraja tidak diluluskan lantaran tidak mengikuti UN pasca mengalami kecelakaan lalu-lintas sebelum pelaksanaan UN.

Kepala SMKN 3 Singaraja I Nyoman Suastika, Senin (13/5), mengaku tidak dapat memaksa anak didiknya karena mengalami cedera kepala berat.

"Siswa kami ini memang hingga saat ini belum bisa sekolah pasca kecelakaan dan mengalami CKB. Jadi bukan karena nakal atau nilainya rendah, ini murni karena kecelakaan sehingga tak bisa ikut ujian dan dia tidak punya nilai," ujar Suastika. Pihak sekolah juga mengaku sudah memanggil orangtua siswa yang bersangkutan untuk kelanjutan pendidikan siswanya.

Sejauh ini pihak sekolah masih siap menerima Satya kembali jika memang akan melanjutkan sekolahnya di SMKN 3 Singaraja. Dengan catatan ia harus mengulang kelas XII kembali untuk bisa dinyatakan lulus. Namun pihak sekolah

juga tak memaksa jika orangtua Satya memiliki pilihan lain yang menyangkut kondisinya saat ini. "Karena yang tidak ada masalah nakal atau sikap, sekolah masih siap menampung, tetapi kalau orangtua ada pilihan lain kami juga tidak memaksa," imbuhnya.

Sementara satu siswa lainnya, namun namanya belum berhasil dikonfirmasi, berasal dari SMAN 2 Busungbiu. Siswa ini sebelumnya disebut-sebut sering bermasalah di sekolahnya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Buleleng, I Made Darwis Wibawa, mengatakan dari 29 SMK Negeri dan Swasta di Buleleng dengan peserta UN 4.676 orang, hanya satu orang peserta dinyatakan tidak lulus. Proses pengumuman yang dilakukan serentak itu pun dilakukan secara online. Sedangkan untuk tingkat SMA dari 32 sekolah negeri dan swasta seluruh peserta UN sebanyak 4.889 siswa juga tak meluluskan satu siswa.

"Sesuai dengan edaran dari Disdik, untuk pengumuman dilakukan dengan persembahyangan bersama menggunakan pakaian adat. Tetapi saya pergunakan sistem online agar tidak ada siswa yang ke sekolah ramai-ramai, untuk menghindari corat-coret dan

euforia yang berlebihan juga," kata dia.

Hanya saja pilihan itu tak lantas membuat siswa kelas XII patuh. Meski dilarang ke sekolah melakukan aksi corat-coret mereka janji dengan teman sekolahnya bertemu di luar sekolah dan merayakan kelulusan bersama.

Sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan Provinsi Bali tertanggal 8 Mei 2019, nomor 800/22889/UK/Disdik, seluruh sekolah diimbau untuk melaksanakan persembahyangan bersama saat hari kelulusan. Selain juga menginstruksikan seluruh seluruh sekolah untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal pengamanan. Masing-masing kepala sekolah juga diwajibkan mengarahkan siswanya untuk tidak merayakan kelulusan yang berlebihan.

Sementara itu siswa yang merayakan kelulusan di jalan raya mendapat atensi dari Sat-lantasPolres Buleleng. Mereka yang melakukan konvoi juga diharapkan tidak ugal-ugalan. Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari menerjunkan sejumlah personelnya. "Kami hanya melakukan imbauan saja agar tidak merayakan dengan berlebihan dan tidak mengganggu kelancaran berlalu lintas," kata AKP Diah. **k23**

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *CALEG*

# Punya Pemilih Terbanyak di Buleleng, Kelurahan Banyuning Kembali Gagal Loloskan Caleg Jemi Gunarta Gagal Lolos ke Dewan, Meskipun Raih 2.850 Suara

Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng tidak pernah bisa meluncurkan wakilnya ke DPRD Buleleng sejak Pemilu pertama era Reformasi 1999

SINGARAJA, NusaBali  
Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng belum juga lepas dari 'kutukan' Pemilu. Sandang predikat sebagai desa/

**Jadwal Imsakiyah Ramadhan**  
Denpasar & Sekitarnya

Magrib	Imsak	Subuh
Selasa, 14 Mei	Rabu, 15 Mei	Rabu, 15 Mei
18.17 Wita	04.55 Wita	05.06 Wita

kelurahan di Kabupaten Buleleng dengan jumlah pemilih terbanyak yakni mencapai 13.677 orang. Banyuning kembali gagal meloloskan wakilnya ke kursi legislatif hasil Pileg 2019. Kegagalan kali ini diwarnai prahara Jemi Gunarta, caleg PDIP yang gagal lolos ke Dewan dengan perolehan 2.850 suara. Banyuning pun perpanjang nasib apes tak pernah mampu meloloskan caleg ke kursi DPRD Buleleng sejak Pemilu pertama era Reformasi 1999.

Dalam Pileg 2019, tercatat ada 13 caleg asal Kelurahan Banyuning yang bertarung berebut kursi legislatif. Dari jumlah itu, 3 orang di antaranya



Jemi Gunarta, caleg PDIP untuk DPRD Buleleng asal Banyuning.

berebut kursi DPRD Bali Dapil Buleleng, yakni Putu Artawan (Demokrat), Putu Dian Fitri Pratiwi (NasDem), dan Putu Darmadi (Perindo).

Sedangkan 10 caleg lainnya dari parpol berbeda, maju tarung berebut kursi DPRD Buleleng. Mereka masing-masing Jemi Gunarta (PDIP), Nengah Sukarta (Golkar), Endrawati Puji Rahayu (Golkar), I Nyoman Ariawan (Demokrat), Luh Made Marwati (Demokrat), Ketut Agus Astika (NasDem), Wahyu Suciati Widiastuti (NasDem), Tri Yohana (Garuda), Made Astawa (Hanura),

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 5*

## CALEG ASAL KELURAHAN BANYUNING DI PILEG 2019

NO	NAMA	PARTAI	LEVEL	SUARA
1	Jemi Gunarta	PDIP	DPRD Buleleng	2.850
2	Nengah Sukarta	Golkar	DPRD Buleleng	740
3	Endrawati Puji Rahayu	Golkar	DPRD Buleleng	92
4	I Nyoman Ariawan	Demokrat	DPRD Buleleng	243
5	Luh Made Marwati	Demokrat	DPRD Buleleng	87
6	Made Astawa	Hanura	DPRD Buleleng	323
7	Nyoman Sidniyani	Hanura	DPRD Buleleng	-
8	Ketut Agus Astika	NasDem	DPRD Buleleng	902
9	Why Suciati Widiastuti	NasDem	DPRD Buleleng	-
10	Tri Yohana	Garuda	DPRD Buleleng	-
11	Putu Artawan	Demokrat	DPRD Bali	416
12	Putu Dian Fitri Pratiwi	NasDem	DPRD Bali	199
13	Putu Darmadi	Perindo	DPRD Bali	-

Nama Media :

Kategori :

*SAMBUNGAN*

## Jemi Gunarta Gagal Lolos ke Dewan,...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

dan Nyoman Sidniyani (Hanura). Sayangnya, tidak satu pun dari 13 caleg asal Kelurahan Banyuning ini mampu lolos ke kursi Dewan hasil Pileg 2019. Padahal, ada 13.677 suara pemilih yang diperebutkan di Banyuning. Untuk kursi DPRD Bali, para caleg asal Banyuning kalah bersaing dengan caleg lainnya. Putu Diah Fitri Pratiwi, misalnya, hanya meraih 199 suara dalam perebutan kursi DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng. Bandingkan perolehan suara Dr Somvir, caleg NasDem asal India yang lolos ke DPRD Bali Dapil Buleleng dengan 11.898 suara.

Demikian pula caleg Demokrat untuk kursi DPRD Bali Dapil Buleleng asal Banyuning, Putu Artawan yang hanya meraih 416 suara. Perolehannya jauh di bawah Komang Nova Sewi Putra, caleg Demokrat asal Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Buleleng yang lolos lagi ke DPRD Bali dengan 10.756 suara.

Caleg asal Banyuning yang meraih suara tertinggi adalah Jemi Gunarta. Caleg PDIP untuk kursi DPRD Buleleng ini meraih suara 2.850 di Dapil I Kecamatan Buleleng. Sayangnya, Jemi Gunarta tetap gagal lolos ke Dewan, karena kalah bersaing dengan 4 caleg PDIP lainnya yang merebut kursi DPRD Buleleng 2019-2024 Dapil I, yakni Wayan Soma Adnyana (politisasi PDIP asal Desa Pengelatan/ lolos dengan perolehan 7.299 suara), Ni Kadek Turkini (Srikadi PDIP asal Desa Kalibukbuk/6.317 suara), Gusti Komang Suwastika (politisasi asal Kelurahan Banjar Bali/4.736 suara), dan Dewa Gede Sugiarto (politisasi PDIP asal Kelurahan Penarukan/4.822 suara).

Demikian juga dengan caleg Golkar asal Banyuning, Nengah Sukarta, yang hanya mendulang 740 suara. Dia kalah saing dengan caleg Golkar lainnya, Nyoman Gedde Wandira Adi, incumbent asal Kelurahan Kaliuntu, yang meraih satu-satunya kursi DPRD Buleleng dari Golkar Dapil I dengan perolehan 4.288 suara.

Hal serupa juga menimpa Ketut Agus Astika, dengan perolehan 902 suara, mesti rela menyerahkan jatah 1 kursi yang diraih NasDem kepada caleg incumbent Made Sudiarta (asal Kelurahan Banjar Jawa) yang kembali lolos dengan perolehan 1.354 suara. Demikian juga Made Astawa, caleg Hanura asal Banyuning yang hanya raih 323 suara, sehingga

kalah saing dengan Gede Wisnaya Wisna (incumbent Hanura asal Kelurahan Kampung Anyar) yang meraih 3.550 suara.

Sedangkan Luh Made Marwati, Srikandi asal Banyuning yang maju sebagai caleg DPRD Buleleng dari Demokrat Dapil I, hanya kebagian 87 suara. Made Marwati sendiri adalah perempuan loper koran yang sempat mengejutkan tahapan Pilkada Buleleng 2017 lalu, ketika mendaftar nyalon Bupati di PDIP. Terpental dari PDIP, Made Marwati banting haluan ke jalur Independen, sebagai Cawabup. Sayangnya, dia tak lolos pencalonan.

Dengan gagalnya semua caleg asal Kelurahan Banyuning dalam Pileg 2019, maka praktis memperpanjang nasib apes kawasan dengan jumlah pemilih terbanyak di Buleleng yang tak pernah punya wakil rakyat di DPRD Buleleng sejak Pemilu pertama era Reformasi 1999. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Buleleng untuk tarung Pileg/Pilpres 2019, jumlah pemilih di Banyuning mencapai 13.677 orang. Ini jumlah pemilih terbesar di Kabupaten Buleleng.

Sedangkan jumlah pemilih terbanyak kedua berada di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan mencapai 12.434 orang, disusul di Desa Bondalem (Kecamatan Tejakula/pemilih 11.259 orang), Desa Tejakula (Kecamatan Tejakula/pemilih 10.004 orang), Kelurahan Penarukan (Kecamatan Buleleng/9.002 orang), Desa Banjar (Kecamatan Banjar/8.998 orang), Desa Lokapaksa (Kecamatan Seririt/8.661 orang), Desa Kubutambahan (Kecamatan Kubutambahan/8.632 orang), Desa Patas (Kecamatan Gerokgak/8.309 orang), dan Desa Pejarakan (Kecamatan Gerokgak/8.305 orang).

Pemilih di Kelurahan Banyuning yang berjumlah 13.677 orang itu tersebar di 6 banjar dinas, yakni Banyuning Timur, Banyuning Tengah, Banyuning Barat, Banyuning Selatan, Banyuning Utara, dan Lingkungan Padangkeling. Dalam coblosan Pemilu, 17 April 2019, mereka menyalurkan hak suaranya di 51 tempat pemungutan suara (TPS).

Dengan jumlah pemilih mencapai 13.677 orang, seharusnya Kelurahan Banyuning bisa meloloskan minimal 3 caleg ke kursi DPRD Buleleng dalam Pileg 2019. Tapi, faktanya malah lain. Beberapa persoalan yang sering jadi kendala, karena jumlah caleg asal Banyuning yang bertarung

ke Pileg selalu banyak. Mereka saling sikut berebut suara di kampung sendiri. Selain itu, pemilih di Banyuning tidak sepenuhnya warga asli setempat, melainkan banyak pendatang.

"Memang sulit memunculkan caleg kurang dari 10 orang di Banyuning dalam Pemilu ke Pemilu. Jumlah caleg selalu lebih dari 10 orang, hingga membuat suara terpecah. Jadinya, tidak pernah ada caleg dari Kelurahan Banyuning yang lolos ke kursi Dewan," sesal Bendesa Adat Banyuning, Jro Made Sedaja, kepada Nuisa Bali di Singaraja, beberapa hari lalu. Selain itu, suara pemilih di Banyuning juga banyak direbut caleg dari luar berstatus incumbent, yang telanjur berinvestasi politik dengan bansos.

Sementara itu, caleg PDIP asal Kelurahan Banyuning, Jemi Gunarta, tak mau larut dalam kekecewaan, meskipun gagal lolos ke DPRD Buleleng dengan perolehan suara lumayan banyak, mencapai 2.850 suara. Menurut Jemi Gunarta, dalam Pemilu 2019 dirinya mengandalkan hati nurani masyarakat untuk memilihnya. Dia merasa sudah ngayah selama ini.

"Tapi, kepentingan masyarakat itu berbeda. Ada yang berpikir untuk makan apa besok, sehingga belum sepenuhnya dengan hati nurani. Saya tahu semua itu, kekompakan hanya di permukaan, tidak sampai ke hati nuraninya," sesal Jemi Gunarta saat dikonfirmasi Nuisa Bali di Singaraja, Senin kemarin.

Tidak kapok berpolitik? Jemi Gunarta menyiratkan tetap akan bergelut di politik, karena untuk bisa dipilih, harus bergabung dengan parpol. "*Care main ceki, lamun sing main, kenkenang bise ngandang. Kalingan ngandang, gebit cekian be sing ngidaang* (Kayak permainan ceki, kalau tidak jadi pemain, tidak mungkin menang. Jangankan bisa menang, nyukit kartu cekian tidak mungkin, Red)," katanya.

Bagi Jemi Gunarta sendiri, bukan sekali ini dirinya gagal dalam tarung Pileg. Sebelumnya, dia pernah maju tarung ke Pileg 2019 sebagai caleg DPRD Buleleng dari Partai Pelopor. Kala itu, dia gagal lolos ke kursi legislatif karena masih memakai nomor urut, sedangkan dirinya mendapat nomor urut 2. Sedangkan dalam Pileg 2014, dia gagal maju sebagai caleg PDIP, meskipun namanya sempat muncul dalam daftar bakal caleg yang diajukan PDIP. **k19**

Nama Media : **NUSA BALI**

Kategori : **RANPERDA**

## Rapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng Eksekutif Diwakili Kadis Bikin Jengkel Dewan



KADIS P2KBPPPA, Made Arya Sukerta (kiri) mewakili eksekutif dalam rapat akhir fraksi, duduk di depan bersama pimpinan rapat Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna dan Wakil Ketua Dewan, Ketut Wiršana.

SINGARAJA, NusaBali

Rapat Lembaga DPRD Buleleng dengan agenda pendapat akhir dari fraksi-fraksi atas tiga Ranperda, Senin (13/5) pagi, mendapat kecaman.

Pasalnya, keterwakilan eksekutif dalam rapat tersebut dinilai tidak menghormati mekanisme rapat. Dalam rapat tersebut, pihak

eksekutif hanya diwakili seorang kepala dinas (Kadis). Sedangkan lembaga Dewan menghadirkan seluruh anggota, termasuk pimpinan Dewan.

Rapat pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Buleleng kali ini, memang berbeda dengan sebelumnya. Biasanya rapat dengan agenda pendapat akhir fraksi disampaikan

melalui forum Rapat Paripurna di ruang Sidang Paripurna. Kali ini, pendapat akhir fraksi disampaikan melalui rapat biasa di ruang rapat Gabungan Komisi.

Kehadiran eksekutif juga tidak biasa, karena yang ikut dalam rapat pendapat akhir fraksi itu hanya SKPD terkait, yakni SKPD yang mengajukan tiga Ranperda yakni Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Ranperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Ranperda PT BPR Bank Buleleng.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan, Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua Dewan, Ketut Wiršana serta anggota masing-masing fraksi. Sedangkan eksekutif diwakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (P2KBPPPA), Made Arya Sukerta.

Nah, keterwakilan eksekutif itulah sempat menghentikan jalannya rapat. Karena anggota Fraksi Golkar, Putu Tirta Adnyana sempat menyampaikan interupsi terhadap pimpinan rapat. "Yang mewakili eksekutif semestinya Sekda atau setingkat Asisten, jangan setingkat Kepala Dinas," kata politisi asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Putu Tirta Adnyana memang dikenal cukup kritis di lembaga DPRD Buleleng. Ia mengkritisi keterwakilan eksekutif karena dirasa tidak menghormati mekanisme rapat dan tidak menghargai lembaga Dewan. "Kali ini saya masih bisa menerima, jangan sampai saya dibilang menghambat pembahasan. Tetapi ke depan tolong lembaga Dewan ini dihormati. Yang memimpin rapat juga Pimpinan Dewan, dan yang mewakili eksekutif hanya setingkat Kepala Dinas," tandasnya. Sementara Ketua DPRD Bule-

leng, Gede Supriatna usai rapat menduga pihak eksekutif belum memahami perubahan dari mekanisme rapat. Dijelaskan, sesuai Tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2018, yang merupakan turunan dari PP Nomor 12 Tahun 2018, ada perubahan mekanisme tata cara persidangan di Lembaga DPRD. Sehingga pendapat akhir fraksi disampaikan melalui rapat biasa dengan menghadirkan pihak terkait saja.

Forum rapat paripurna nanti tinggal penyampaian laporan dari masing-masing Pansus untuk meminta persetujuan pengesahan Ranperda menjadi Perda. "Memang mekanisme ini baru. Mungkin saja dari pihak eksekutif lalai, atau belum mengetahui ada perubahan mekanisme, sehingga dikira hanya rapat biasa. Tadi saya sudah mengingatkan agar memahami mekanisme tata cara persidangan di lembaga Dewan," jelasnya. **k19**

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *RANPERDA*

# Pemkab Didorong Bangun 'Rumah Aman'

## ★ Diperuntukkan bagi Korban dan Pelaku di Bawah Umur

SINGARAJA, NusaBali

Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, mendorong Pemkab Buleleng mewujudkan pembangunan 'Rumah Aman'. Alasannya, salah satu poin penting dalam ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu adanya 'Rumah Aman' bagi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.

"Ya kami sepakat dengan poin adanya 'Rumah Aman' dalam ranperda. Karena dengan Rumah Aman itu dapat memberi perlindungan dan pendampingan bagi para korban maupun pelaku anak-anak di bawah umur," kata Ketua Pansus, Ni Kadek Turkini,

usai rapat pembahasan, Senin (13/5) di Gedung DPRD Buleleng.

Menurut politisi PDIP asal Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng ini, pihaknya akan mendorong Pemkab Buleleng bisa mewujudkan 'Rumah Aman' di tahun 2020 mendatang. Karena ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan itu masih perlu proses sosialisasi setelah ditetapkan menjadi Perda. "Target kami, mungkin tahun 2020 baru bisa dialokasikan dananya. Karena ini kan masih perlu proses, perdanya kan belum disahkan, setelah disahkan perlu ada sosialisasi, setelah itu baru bertahap mewujudkan apa yang ada dalam perda itu," jelasnya.

Sementara Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng, I Made Rico Wibawa mengungkapkan, selama ini anak-anak di bawah umur yang menjadi korban maupun pelaku dari tindak kekerasan sulit mendapat perlindungan secara psikis. Sehingga mereka akan tetap menjadi korban, ketika dikembalikan ke rumah, entah korban olok-olok dari teman sejawatnya atau korban dari keluarganya sendiri akibat kesalahannya. "Mereka ini karena di bawah umur, belum bisa ditahan. Nah kemana mereka ini, ketika dikembalikan lagi kepada orangtuanya, ini akan kembali menjadi korban. Sehingga mereka ini tidak mendapat perlindungan secara psikis," katanya.

Karena itu, lanjut Rico Wibawa mendorong agar ranperda Per-



PEMBAHASAN Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

lindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan memasukan pembangunan 'Rumah Aman' bagi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan. "Mereka di Rumah Aman itu akan mendapat perlindungan secara psikis. Selama ini

perlindungan kami tidak optimal, karena kadang kami harus datang ke rumah korban atau pelaku, atau sebaliknya mereka (korban maupun pelaku,Red) datang kepada kami. Kalau ada Rumah Aman, tentu perlindungan akan menjadi optimal," jelasnya. **K19**